

**ANALISIS DESKRIPTIF PRAKTIK PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA PERUSAHAAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

AMALINA WINDA ILHAMI

NIM. 12030111130170

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama penyusun : Amalina Winda Ilhami

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130170

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS DESKRIPTIF PRAKTIK,
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DI PERUSAHAAN BADAN USAHA
MILIK NEGARA**

Dosen Pembimbing : Faisal, SE., MSi., PhD., CMA, CRP

Semarang, 31 Oktober 2017

Dosen Pembimbing,



(Faisal, SE., MSi., PhD., CMA, CRP)

NIP. 19710904 200112 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Amalina Winda Ilhami
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130170
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS DESKRIPTIF PRAKTIK
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PADA PERUSAHAAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Nopember 2017

Tim penguji :

1. Faisal, S.E., M.Si., PhD., CMA, CRP (.....)
2. Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt (.....)
3. Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Amalina Winda Ilhami, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Deskriptif Praktik Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Perusahaan BUMN”**. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari orang lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 31 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,

(Amalina Winda Ilhami)

NIM : 12030111130170

ABSTRACT

The objective of this study is to find out the extent of State-Owned Enterprises' (SOEs) corporate social responsibility disclosure. This study was conducted on public listed or private, and so about each type of industry in State-Owned Enterprises.

The sample used in this study is SOEs which disclosed the 2015 annual report on the company or on the Indonesia Stock Exchange's (IDX) website. GRI 3.1 is used to measure the extent of SOEs' corporate social responsibility disclosure in the annual report. The analysis method is done through descriptive statistical test.

The findings of this study is the level of social responsibility disclosure done by state-owned enterprises is highly valued, especially in state-owned companies whose shares have been go-publicly and included in the mining and quarrying industry sectors.

Keywords: SOEs, GRI 3.1, CSR disclosure

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui jangkauan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Pengujian dilakukan pada perusahaan BUMN yang telah *go-public* maupun yang tidak *go-public* serta berdasarkan masing-masing sektor industri pada perusahaan BUMN.

Sampel yang digunakan adalah perusahaan BUMN yang mengungkapkan laporan tahunan 2015 pada website perusahaan atau dalam website Bursa Efek Indonesia. GRI 3.1 digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Metode analisis dilakukan melalui pengujian statistik deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan BUMN dinilai tinggi terutama pada perusahaan BUMN yang sahamnya telah *go-public* dan masuk dalam sektor industri pertambangan dan penggalian.

Kata kunci: BUMN, GRI 3.1, pengungkapan tanggung jawab sosial

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah will helps him who moves in the way of Allah – Abu Bakr (RA)

The greatest JIHAD is to battle your own soul, to fight the evil within yourself

- Prophet Muhammad SAW

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Abah, Umi, dan Adinda tersayang

Sahabat dan teman-temanku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Deskriptif Praktik Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa doa, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Fuad, M.Si., Ph.D., selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Faisal, SE., MSi., PhD., CMA, CRP., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah mendampingi dan memberikan arahan yang diperlukan penulis selama perkuliahan.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu bagi penulis, serta seluruh staff yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua, Abah dan Umi yang telah sabar dan tidak berhenti memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada anaknya hingga saat ini.
7. Adikku tercinta, Adinda Nisage Fadhlillah (Alm) terima kasih untuk 17 tahun yang sangat berarti dalam hidup penulis, juga atas doa dan semangatmu.
8. Sahabat-sahabat tersetai Nadia Rizqiana H, Amalia Fatmasari, Uswatun Khasanah, Hana Umayektinisa, terima kasih telah menjadi pendengar, penyemangat, *therapist*, dan ada disaat penulis *nearly give up on everything, your support are indeed amazingly amazing*.
9. Om dan tante Basuki beserta para “calon penghuni surga”: Lupi, Denita, Dila, Neza, Anin, ‘dik Berli, Nice Hana dan para penyusup, Fajar dan Redita, terima kasih atas segala macam dan bentuk dalam memberikan motivasi, bantuan, serta dukungan. *Thanks for bring my laughter back and even louder than ever*.
10. Sahabat berbeda gender yang sangat langka dimiliki oleh penulis: Yunan, dan Rizky Bayu yang telah banyak membantu dalam keseharian penulis saat di Tegal dan Semarang.

11. Teman-teman “*teletubies*” Mebi, Isma, Uli, Axel, Nanin, Nutfi yang selalu saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi : Rizky Bayu, Vena, Ondi, Wahyu, Aris, Melanie, Hasna, Hanif, dan Alif.
13. Keluarga besar Akuntansi Universitas Diponegoro 2011.
14. Kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis hingga akhir penyelesaian skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisannya, skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 31 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAA ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB	I
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar	
Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Institusional.....	11
2.1.2 Teori Legitimasi.....	13
2.1.3 Teori Stakeholder.....	15
2.1.4 Konsep Corporate Social Responsibility.....	18
2.1.5 Regulasi Pemerintah.....	23
2.1.6 Global Reporting Initiative Index.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran.....	39
3.1.1 Variabel Penelitian.....	39
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5 Metode Analisis Data.....	42
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	42
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	44
4.2 Analisis Data.....	45

4.2.1 Analisis Deskriptif.....	45
4.3 Interpretasi Hasil.....	52
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Keterbatasan.....	59
5.3 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65
Lampiran A Daftar Perusahaan BUMN.....	65
Lampiran B Statistik Deskriptif.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator GRI 3.1 (2011).....	27
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	35
Tabel 3.1 Indikator GRI 3.1.....	40
Tabel 4.1 Statistik deskriptif.....	45
Tabel 4.2 Statistik deskriptif Nilai Total.....	48
Tabel 4.3 Daftar perusahaan BUMN <i>go-public</i> dan <i>non go-public</i>	49
Tabel 4.4 Statistik deskriptif status perusahaan.....	49
Tabel 4.5 Jumlah perusahaan BUMN dalam kategori sektor Industri.....	50
Tabel 4.6 Statistik deskriptif sektor industry.....	51

LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan BUMN.....	65
Lampiran B Statistik Deskriptif.....	68

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penelitian mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada negara berkembang telah dilakukan sejak tahun 1980-an (Singh and Ahuja, 1983; Tsang, 1998; Abu-Baker and Naser, 2000; Haniffa and Cooke, 2005; Lim *et al.*, 2008). Penelitian tersebut menilai sifat, cakupan, dan faktor yang berpengaruh pada luasnya cakupan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan sebuah perusahaan (Esa dan Ghazali, 2010). Menurut Priyanti, Kamayanti dan Atmadja (2011) salah satu pokok yang terdapat dalam tatakelola perusahaan yang baik adalah agar perusahaan memiliki keberpihakan pada *stakeholder* dalam bentuk akuntabilitas laporan perusahaan atau pengungkapan yang di dalamnya terdapat pengungkapan sosial (*social disclosure*) dalam laporan tahunan. Ide pokok dari CSR adalah membuat perusahaan tidak hanya mengedepankan tanggung jawab yang berpatokan atas *single bottom line* tetapi juga tanggung jawab yang berpatokan atas *triple bottom line* dimana tidak hanya memberikan atensi atas pencapaian keuntungan perusahaan namun memperhatikan pula masalah sosial dan lingkungan. Adanya prinsip *triple bottom line* bukan semata-mata memenuhi kepentingan *shareholder* saja, melainkan memenuhi pula keperluan *stakeholder* secara luas.

Tiga komponen yang terdapat dalam *triple bottom line* (*profit, people, planet*) melambangkan pokok pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

development). Dengan berjalannya konsep tersebut di dalam operasional perusahaan maka akan menunjukkan komitmen perusahaan tersebut bukan sekadar tertuju atas profit semata namun memperhatikan pula segi sosial dan lingkungannya. Pelaksanaan CSR yang dilakukan secara konsisten akan menumbuhkan kebertrimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan disekitarnya dan kegagalan perusahaan dalam melaporkan kegiatan sosialnya akan membuat perusahaan tersebut kehilangan “lisensi operasional”.

Menurut Tanudjaja (2009) pada dasarnya, masing–masing perusahaan memiliki sudut pandangnya sendiri dalam memaknai CSR. Adanya perbedaan dalam sudut pandang mengenai pengungkapan CSR memberikan implementasi yang berbeda pula pada tiap perusahaan tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut memaknai CSR. Dengan adanya perbedanan tersebut, disinilah letak pentingnya pembentukan regulasi dalam pengungkapan CSR bagi perusahaan. Dengan terbentuknya suatu regulasi mengenai CSR, maka dapat meningkatkan sifat pengungkapan CSR yang awalnya bersifat suka rela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban (*mandatory*).

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji pengungkapan CSR di Indonesia (Anggraini, 2006; Utami dan Prastiti, 2011; Wijaya, 2012; dan Rustiarini, 2011). Namun tidak banyak yang berfokus pada pengungkapan dan praktik CSR di perusahaan yang berkaitan erat dengan pemerintahan atau dalam hal ini perusahaan BUMN di Indonesia. Peran perusahaan BUMN sangatlah vital karena ikut serta dalam pembangunan dan perkembangan usaha kecil, ekonomi lemah serta koperasi. Dengan adanya penelitian mengenai CSR pada perusahaan

BUMN di Indonesia akan memberikan beberapa indikasi untuk menilai apakah peraturan yang telah dibuat dan diterapkan dalam melaksanakan CSR memiliki dampak yang positif pada perusahaan.

Penelitian yang berfokus pada perusahaan yang terkait dengan pemerintah telah dilakukan sebelumnya oleh Ghazali dan Esa (2011) di Malaysia. Penelitian tersebut menilai pengaruh dari regulasi pemerintah dan tata kelola perusahaan di Malaysia terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintahan. Dari hasil studi yang dilakukan oleh peneliti, regulasi pemerintah mempunyai imbas yang cukup substansial dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang mana harus dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai keterkaitan dengan pemerintahan di Malaysia.

Pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan BUMN semestinya mempunyai cakupan lebih luas apabila dibandingkan dengan perusahaan swasta. Luasnya cakupan pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN dikarenakan perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab untuk dapat memenuhi janji politik pemerintah yang mana perusahaan BUMN harus mampu untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tiga sendi utama pembangunan (mereduksi jumlah pengangguran, penduduk miskin, dan eskalasi pertumbuhan ekonomi).

BUMN sendiri menurut Undang Undang 19 Tahun 2003 merupakan badan usaha yang semua atau sebagian banyak asetnya dikuasai oleh Negara melalui penyertaan secara langsung dan bersumber pada kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk perusahaan BUMN tidak hanya berfokus pada *profit orientation* tetapi

terdapat juga bentuk nirlaba yang menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kepentingan masyarakat. Menurut Sugiharto (2007) BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia sehingga, mempromosikan aktivitas dan pengungkapan CSR melalui perusahaan BUMN merupakan langkah proaktif yang dapat diambil oleh pemerintah.

Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah atau dalam hal ini perusahaan BUMN memiliki karakteristik yang unik. Keunikan karakteristik yang dimiliki perusahaan BUMN adalah adanya keuntungan yang mereka miliki dalam hal mendapatkan pinjaman, pemenangan tender, dan kesempatan. Keunikan tersebut sangat jarang dimiliki oleh perusahaan yang kepemilikannya di privatisasi. Dengan adanya keuntungan yang diberikan, perusahaan BUMN memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Perusahaan BUMN juga diharapkan mampu untuk menanggung kewajiban memimpin perusahaan swasta dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang melingkupi permasalahan lingkungan dan sosial.

Pengungkapan sosial dalam laporan keuangan perusahaan BUMN belum menjadi kewajiban di Indonesia. Pengungkapan aktivitas sosial yang dilakukan masih bersifat sukarela karena pemerintah baru mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial pada 1 Agustus 2012 melalui Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun bersifat sukarela, pemerintah telah mengatur aktivitas dan pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan selanjutnya

diperbaharui pertama kali dengan dikeluarkannya peraturan menteri BUMN PER-05/MBU/2007 dan di dalam tahun tersebut disahkan pula UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada tahun inilah isu mengenai CSR mulai berkembang pesat di Indonesia. Pembaruan berikutnya dilakukan pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya peraturan menteri negara BUMN PER-09/MBU/07/2015. Perubahan resmi terkait peraturan pada tahun 2015 salah satunya adalah mengenai batas maksimum kekayaan bersih yang harus dimiliki perusahaan BUMN sebagai salah satu syarat untuk melakukan kegiatan CSR.

Praktik CSR yang dilakukan oleh BUMN menarik untuk dikaji karena aktivitas CSR pada BUMN diharapkan lebih maju apabila dibandingkan dengan aktivitas CSR perusahaan swasta. Hal tersebut dikarenakan terdapat suatu “paksaan” berbentuk regulasi pemerintah melalui Kepmen BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015, menyatakan bahwa perusahaan BUMN wajib untuk menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)¹ yang merupakan bagian kecil dari CSR. Dengan adanya “paksaan” tersebut maka dapat menguatkan adanya kemungkinan perusahaan BUMN meningkatkan kemampuan kontribusinya dalam kegiatan sosial dibandingkan kontribusi yang dilakukan perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, dapat pula diketahui apakah usaha dalam membentuk dan menetapkan regulasi pada perusahaan BUMN di Indonesia memiliki pengaruh yang positif terhadap aktivitas sosial perusahaan BUMN.

Berdasarkan Pasal 88 UU No. 19 Tahun 2003 dalam menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN dapat mencadangkan sebagian dari laba

¹ Kepmen BUMN No. Per-09/MBU/07/2015(pasal 2)

bersihnya yang ditujukan sebagai dana untuk membina usaha kecil/koperasi dan masyarakat sekitar BUMN. Ketentuan yang berdasar pada UU No.19 tahun 2003 dan PER-09/MBU/17/2015 menjadikan adanya upaya dalam memenuhi tujuan BUMN dengan ikut memberikan peran aktif dalam membimbing dan memberi bantuan bagi pengusaha yang tergolong dalam ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Di lain sisi Persero dalam batas kepatutan dapat pula mendonasikannya dalam bentuk amal atau tujuan social berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang (Pasal 90 UU No. 19 Tahun 2003).

Membuat sebuah catatan dan laporan mengenai kebijakan perusahaan, program, dan biaya aktivitas sosial dalam laporan tahunan bukan merupakan hal yang mudah dilakukan bagi satu perusahaan. Dengan adanya latar belakang masalah seperti ini, akan menarik jika dilakukan satu penelitian yang menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi aturan dari pemerintah dalam melakukan laporan atas aktivitas sosial yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Kesadaran atas pentingnya pengungkapan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) didasari oleh pandangan bahwa perusahaan bukan sekedar memiliki tanggung jawab ekonomi dan legal untuk pemegang saham, melainkan memiliki tanggung jawab terhadap pihak -pihak lain yang berkepentingan (Wijaya, 2012).

Menurut Burnette dan Hansen (2008) keuntungan dalam membuat laporan CSR adalah karena dengan adanya laporan CSR maka tersedia kerangka kerja yang menghubungkan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan strategi pengambilan

keputusan aspek sosial. Untuk membuat laporan CSR tersebut sebuah organisasi atau perusahaan harus menyesuaikan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Pada saat pelaksanaannya, CSR memiliki dua aspek yang menggerakkan perusahaan yaitu aspek penggerak dari luar perusahaan dan aspek penggerak yang berasal dari dalam perusahaan. Aspek penggerak yang bersumber dari eksternal perusahaan, misalnya regulasi dan hukum. Aspek penggerak yang berasal dari dalam perusahaan salah satunya adalah perilaku pemilik dan manajemen yang didalamnya terdapat standar kepedulian bagi pembangunan masyarakat di sekitar perusahaan (Daniri, 2008)

Peraturan pemerintah merupakan segala regulasi yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah sebagai ketentuan yang harus dijalankan perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR perusahaan pada laporan tahunannya. Regulasi pemerintah memiliki esensi yang harus dipedulikan oleh perusahaan terlebih oleh perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah. Regulasi pemerintah dan luasnya cakupan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan seharusnya memiliki hubungan yang positif sehingga semakin banyak regulasi yang disahkan pemerintah dan harus ditaati atau dilaksanakan perusahaan, semakin luas pula cakupan pengungkapan CSR.

Perihal yang mendasari perusahaan dalam melakukan kewajiban atas tanggung jawab sosialnya adalah adanya regulasi yang harus dipatuhi yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, PER-09/MBU/07/2015 tentang upaya BUMN dalam kewajibannya untuk ikut memberikan peran dalam memberi arahan dan kontribusi bagi pengusaha yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah, koperasi,

dan masyarakat. Selain peraturan diatas, terdapat pula peraturan UU No. 40 tahun 2007 yang mewajibkan bagi perseroan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan apabila bidang usahanya berkaitan dengan sumberdaya alam. Undang - Undang tersebut menetapkan pula bagi perseroan untuk melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dalam Laporan Tahunan.

Seiring dengan berkembangnya CSR banyak perusahaan akhirnya menyadari bahwa dalam mengungkapkan suatu laporan tidak hanya berdasar pada *single bottom line* atau kondisi keuangan suatu perusahaan saja tetapi juga diharuskan untuk bedasar pada *triple bottom line* yang mengungkapkan tidak hanya kondisi keuangan perusahaan tersebut tetapi juga memperhatikan beberapa aspek informasi social dan lingkungan (*sustainability report*). Informasi social dan lingkungan ini disusun dengan berpedoman pada standar *Global Reporting Initiative* yang mana disusun terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan.

Amran dan Devi (2008) menyatakan bahwa aktivitas CSR yang dilaksanakan perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah atau sahamnya mayoritas dimiliki oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan selaras dengan kepentingan yang dibawa oleh pemerintah didalamnya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kepemilikan saham oleh pemerintah dengan pelaporan CSR.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN diharapkan memiliki cakupan yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena adanya beberapa tuntutan yang telah dijelaskan. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan BUMN

yang tidak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara luas dan bahkan tidak mempublikasikan laporan tahunan perusahaannya.

Bersumber pada penjabaran yang dilakukan dalam latar belakang, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Tingkat Pengungkapan CSR pada Perusahaan BUMN?” Dari rumusan masalah tersebut maka dapat menjadi pertanyaan Seberapa luas praktik pengungkapan CSR perusahaan BUMN dalam laporan tahunan?

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bersumber pada permasalahan yang telah dijabarkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai seberapa luas praktik pengungkapan CSR perusahaan BUMN dalam laporan tahunan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1.3.2.1 Untuk mengetahui bagaimana luasnya cakupan laporan CSR perusahaan BUMN yang terdapat dalam laporan tahunan.

1.3.2.2 Penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran mengenai luas praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang penelitian bagaimana peraturan pemerintah memiliki pengaruh terhadap luasnya cakupan pengungkapan laporan CSR dalam

perusahaan BUMN. Melalui latar belakang yang tertulis kemudian dijadikan sebagai dasar perumusan masalah penelitian yang seterusnya menjadi dasar dalam menentukan manfaat dan tujuan penulisan, seraya sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang memuat beberapa penjelasan mengenai teori yang dijadikan landasan penelitian. Serta pembahasan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian. Berdasarkan teori – teori yang ada dan penelitian terdahulu maka dibuat kerangka teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode riset, sistem penetapan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis yang memiliki peranan bagi pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisa terhadap data serta penjelasan tentang temuan empiris yang ditemukan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan yang diperoleh selama melakukan riset dan pemberian saran untuk selanjutnya diharapkan mampu dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya atau sebagai bahan implikasi.